



## FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK

Fajri Ramdani<sup>1</sup>, Yana Ulfah<sup>2</sup>, Salmah Pattisahusiwa<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Mulawarman. Jalan Tanah Grogot No.1, Samarinda

E-mail: yana.ulfah@feb.unmul.ac.id

---

### Article History

Received: 2022-09-01

Accepted: 2022-09-29

### DOI:

Copyright@year  
owned by Author(s).  
Published by JIAM.

### ABSTRAK

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60 kuesioner. Pengolahan data menggunakan program Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak, Diskriminasi dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak.

**Kata kunci:** Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Sanksi Perpajakan

### ABSTRACT

*The study is to analyze the influence of taxation system, discrimination, and tax sanctions to acts of taxpayer's perception of ethics on tax evasion. The data collection method used in this study is a survey method using a questionnaire distributed to respondents, namely, an individual taxpayer in Samarinda City. The sample used in this study were 60 questionnaires. Processing data using Partial Least Square (PLS). The results of this study indicates that the taxation system variable has a negative effect on taxpayers' perceptions about the ethics of tax evasion, Discrimination and tax sanctions have a positive effect on the taxpayer's perception of ethics of tax evasion.*

**Key words:** Taxation system, Discrimination and Tax sanctions.

---

### A. PENDAHULUAN

Penggelapan pajak merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghindari pajak dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan (Kurniawati dan Toly, 2014). Dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Salah satu faktor penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu sistem perpajakan, di Indonesia menganut *Self Assessment System*, didalam sistem tersebut terdapat unsur penting yang

mempengaruhi pelaksanaan sistem tersebut, yaitu kesadaran, kejujuran dan tanggung jawab dari wajib pajak. Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya (Indriyani dkk., 2016). Semakin baik sistem perpajakan yang ada, penggelapan pajak (*tax evasion*) cenderung dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Wajib pajak sekarang ini, kurang menyadari tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada peraturan, dan wajib pajak merasa apa yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka terima.

Faktor lain yang menjadi salah satu alasan wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah diskriminasi. Diskriminasi dalam perpajakan diartikan sebagai suatu kebijakan perpajakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak lain merasa dirugikan (Indriyani dkk., 2016). Seperti penerapan *tax amnesty* yang banyak memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah. Hal ini dikarenakan *tax amnesty* dinilai telah melukai rasa keadilan lantaran diskriminatif terhadap Wajib Pajak dan *tax amnesty* dianggap memberi hak khusus kepada pihak yang tak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, proses pemeriksaan, dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945 pasal 27 ayat 1 (Irmansyah, 2016). Semakin tingginya diskriminasi dalam perpajakan dapat memicu semakin tingginya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor lain yang menjadi alasan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu karena adanya sanksi perpajakan. Semakin besarnya denda yang dibebankan akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sanksi perpajakan sendiri terdiri dari dua macam, sanksi administratif dan sanksi pidana. Banyaknya kasus pelanggaran perpajakan membuktikan bahwa dampak dari sanksi yang telah diterapkan sekarang ini kurang menimbulkan efek jera.

Kota Samarinda sebagai salah satu kota yang berkembang pesat pada saat ini juga terdapat beberapa kasus penggelapan pajak yang terjadi. Salah satu yang terjadi adalah yang dilakukan salah satu pengusaha yang bergerak di bidang kayu lapis di dakwa jaksa penuntut umum Kejaksaan negeri Samarinda telah melakukan penggelapan pajak atau mengemplang pembayaran pajak dari hasil usaha semenjak tahun 2005, jumlah pembayaran wajib pajak yang seharusnya di lampirkan di SPT Rp 6.4 Miliar namun oleh pelaku di laporkan hanya Rp 400.000.000 dan banyak lainnya.

Beberapa penelitian mengenai persepsi wajib pajak terhadap etika atas tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), seperti penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) dan Ningsih dan Devy (2015) menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*) dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) dan serupa dengan penelitian Ardyaksa dan Kiswanto (2014) yang menemukan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Sedangkan penelitian Paramita dan Budiasih (2016) menemukan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Atas dasar fenomena dan ketidakpatuhan hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Ningsih dan Devy (2015) dengan menambahkan variabel yang digunakan oleh Rachmadi (2014) yaitu Sanksi perpajakan. Sanksi pada sistem perpajakan di Indonesia dinilai kurang efektif dan kontra produktif terhadap fungsi anggaran dari pajak dan pengembangan ekonomi sehingga perlu dikaji keberadaan dan efektifitasnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi dan perbaikan peraturan Undang-Undang Perpajakan disertai sanksi yang tegas agar kedepannya praktek penggelapan pajak dapat ditekan serendah mungkin dan penerimaan pajak dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

1. Untuk Menguji pengaruh sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk Menguji pengaruh diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
- Untuk Menguji pengaruh Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

## B. METODE

### Definisi Operasional

1. Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.
2. Sistem perpajakan merupakan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan penyetoran pajaknya serta sosialisasi atau penyuluhan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai akses penyetoran pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).
3. Diskriminasi dalam perpajakan merupakan kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan yang tidak seimbang terhadap masyarakat maupun Wajib Pajak (Abrahams & Kristanto, 2016).
4. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan (Resmi, 2013).

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer berupa kuisisioner yang diberikan langsung kepada 60 responden kemudian akan diolah dengan software SmartPLS dan data mengenai gambaran umum responden mengenai persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*) yang didapat dari narasumber. Data primer kuisisioner bersumber dari wajib pajak orang pribadi.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey* dengan menggunakan kuisisioner yang disebar ke responden yaitu, wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. Selanjutnya, peneliti akan melakukan penyebaran kuisisioner secara langsung kepada sampel penelitian, yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Samarinda.

Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert 5 tingkat preferensi jawaban.

## Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis data yang kokoh karena dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak harus besar.

## Model Spesifikasi

Model spesifikasi dalam PLS menurut Ghazali (2006:22) terdiri dari 3 set hubungan yaitu, *inner model*, *outer model*, dan *weight relation*. *Outer model* menunjukkan hubungan antara konstruk atau variabel dengan indikatornya, *inner model* menunjukkan hubungan antar konstruk atau variabel, dan *weight relation* menunjukkan hubungan nilai varian antar indikator dengan konstruk sehingga diasumsikan memiliki nilai rata-rata sama dengan nol dan varian sama dengan satu untuk menghilangkan konstanta dalam persamaan kualitas yang ada.

## Pengujian *Outer Model* Indikator Konstruk

Sumber: Data yang diolah PLS (*Partial Least Square*) (2019)

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)	R Square
X1	0.723	0.738	0.842	0.640	
X2	0.600	0.600	0.818	0.693	
X3	0.749	0.832	0.834	0.562	
Y	0.875	0.884	0.923	0.799	0.418

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *cronbachs alpha* dan *composite reliability* semua kontruk telah lebih dari 0,60. Dengan demikian, setiap konstruk dalam model penelitian dapat dikatakan reliabel.

Untuk pengujian validitas konvergen dapat dilihat dari nilai AVE seluruh konstruk pada tabel diatas yang menunjukkan hasil lebih dari dari 0.50. Dengan demikian, nilai AVE tersebut telah memenuhi *rule of thumb* yang digunakan untuk menguji validitas konvergen (Hartono, 2009:71). Ini mengindikasikan bahwa data telah valid untuk dilakukan pengujian berikutnya.

Hasil pengujian validitas diskriminan berdasarkan nilai *cross loading* pada lampiran 5 adalah nilai *cross loading* masing-masing indikator konstruk memiliki nilai yang lebih tinggi atau mengumpul pada kontruk yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan secara empiris bahwa setiap konstruk memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya.

## Hasil Pengujian Model Struktural dan Hipotesis Penelitian

Model struktural (*inner model*) diukur dengan melihat koefisien parameter jalur hubungan antar variabel laten. Pengujian model struktural (*inner model*) dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel laten yang terdapat dan dirancang dalam suatu penelitian.

## Hasil Uji Hipotesis Penelitian

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik	P Values	Keputusan
X1 -> Y	-0.377	-0.394	0.127	2.959	0.004	Diterima
X2 -> Y	0.329	0.319	0.155	2.125	0.038	Diterima
X3 -> Y	0.259	0.282	0.105	2.471	0.016	Diterima

Sumber: Data yang diolah PLS (*Partial Least Square*) (2019)

Hipotesis yang dibangun dalam studi ini menggunakan pengujian satu arah (*one tailed*) pada  $H_1, H_2$  dan  $H_3$  dan tabel 4.10 di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis yang ada diterima karena nilai *t-statistics* nya lebih dari dari *rule of thumb one tailed* yaitu,  $>1,64$ . Berdasarkan data pada tabel 4.10 diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) hipotesis kedua ( $H_2$ ) dan hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima. Berikut ini adalah uraian pengujian hipotesis setiap konstruk pada model penggelapan pajak.

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil pengujian hipotesis yang terdapat pada tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa *t-statistics* untuk  $H_1$  adalah 2.959 ( $>1.64$ ) dengan koefisien berarah negatif sebesar -0.377 sehingga dapat disimpulkan  $H_1 =$  diterima yang berarti sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiani (2016), Ningsih dan Devy (2015), Yuli (2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil pengujian hipotesis yang terdapat pada tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa *t-statistics* untuk  $H_2$  adalah 2.125 ( $>1.64$ ) dengan koefisien berarah positif sebesar 0.329 sehingga dapat disimpulkan  $H_2 =$  diterima yang berarti diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013), Silaen (2015), Sulistiani (2016) dan Wicaksono (2014) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak terhadap etika atas tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil pengujian hipotesis yang terdapat pada tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa *t-statistics* untuk  $H_3$  adalah 2.471 ( $>1.64$ ) dengan koefisien berarah positif sebesar 0.259 sehingga dapat disimpulkan  $H_3 =$  diterima yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi (2014), Yuli (2016) dan Sulistiani (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

## E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil menyatakan bahwa sistem perpajakan, diskriminasi, dan sanksi perpajakan sangat penting dalam mengurangi penggelapan pajak (tax evasion) pada wilayah Samarinda maka perlu adanya analisa dan tindak lanjut mengenai sistem perpajakan, diskriminasi, dan sanksi perpajakan dengan demikian peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Samarinda disarankan perlu adanya analisa dan tindak lanjut mengenai sistem perpajakan, diskriminasi, dan sanksi perpajakan karena penting dalam mengurangi tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Salah satunya dengan memberikan sosialisasi tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, agar Wajib Pajak mengerti dan memahami tata cara sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menambah jumlah responden, wilayah penelitian diperluas dan menambah jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap etika atas tindakan penggelapan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrahams, N. B. & Kristanto, A. B. 2016. Persepsi Calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak terhadap Etika atas penggelapan pajak di Salatiga. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 1(1). Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Ardyaksa dan kiswanto 2014. Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak pada pegawai negeri sipil kantor DPRD Kaltim. Skripsi. Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Friskianti, Yossi dan Bestari Dwi Handayani. 2014. Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. Accounting Analysis Journal 2014 3 (4). Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2006. Metode Alternatif dengan Partial Least Square. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hair, J.F, Black, W.C, Babin, B.J., Anderson, R.E., and Tatham. R.L 2008. Multivariate data analysis, 6th Ed Pearson Prentice Hall. New Jersey.
- Hartono, J. Dan Abdillah, W. 2009. Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris. BPFE. Yogyakarta.
- Ikbal, Muhammad. 2015. Metodologi Penelitian : untuk Ekonomi dan Bisnis. Samarinda.
- Indriyani, Mila, S. Nurlela, dan E.M Wahyuningsih. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. Prosiding Seminar Nasional IENAC.
- Irmansyah, Adi. 2016.
- [http://m.kbr.id/berita/122016/mk\\_tolak\\_gugatan\\_uu\\_pengampunan\\_pajak/87481.html](http://m.kbr.id/berita/122016/mk_tolak_gugatan_uu_pengampunan_pajak/87481.html), diakses 29 Juni 2019.
- Kurniawati, Meiliana dan Agus Arianto Toly. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. Jurnal.Seri Tax dan Accounting Review, Vol 4, No 2, 2014. Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muhtadhin's, Akhmad. 2016. Penggelapan Pajak. <http://amtadin.blogspot.co.id/2016/04/penggelapanpajak.html>?i Diakses pada tanggal 03 Desember 2018.

- Mukharoroh, Annisa'ul dan Nur Cahyonowati. 2014. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Jurnal Volume 3, tahun 2014, halaman 1-7 ISSN (online): 2337-3806. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nickerson, I., Pleshko, & McGee. 2009. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 12(1).
- Ningsih, Devi dan Devy Pusposari. 2015. Determinan Persepsi mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ) ( Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). Jurnal. Universitas Brawijaya, Malang
- Paramita, Mirah Pradnya dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih.2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Journal Vol.17, No.2.2016.Universitas Udayana.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak. Jurnal Volume 3, Nomor 2, tahun 2014. ISSN (Online) : 2337-3806. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta
- Silaen, Charles. 2015. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion). Jom FEKON, 2 (2). Universitas Riau, Pekanbaru.
- Siahaan, Marihot P. 2010. "Hukum Pajak Elementer". Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sulistiani, Iis. 2016. Faktor-faktor yang Mepengaruhi Presepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan Tax Evasion. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang
- Suminarsasi & Supriadi 2011. Pengaruh Faktor – faktor persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Balikpapan. Skripsi. Universitas Mulawarman, Samarinda.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wahyu Rachmadi 2014. Faktor – faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi atas perilaku penggelapan pajakpada KPP Pratama Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta
- Wicaksono, Muhammad Ary. 2014. Pengaruh Presepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang
- Wikipedia.org. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/penghindaran\\_pajak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/penghindaran_pajak). Diakses pada 15 Desember 2018.
- Yuli, Ardiyansyah. 2017. Pengaruh Keadilan, Sistem Self Assessment System, Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Tindakan Tax Evasion. Skripsi. Universitas Hasanudiin, Makassar
- Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan. Salemba Empat, Jakarta
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)